



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**

# RENCANA

# KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PEMALANG

# 2024



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 050 / 182 / TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024 diperlukan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang 2024;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja;
  - b. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal

Plt. BUPATI PEMALANG  
WAKIL BUPATI,



MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR : 050/182 /TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
 PEMALANG TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

No	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pemalang	Wakil Ketua	
3.	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Sekretaris	
4.	Koordinator Pelayanan Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	
5.	Koordinator Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	
7.	Subkoordinator Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	
8.	Subkoordinator Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	
9.	Subkoordinator Pengembangan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	
10.	Subkoordinator Pengendalian Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	
11.	Bendahara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	Reni Sri Diartini
12.	Pengelola Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	Rusmiyati
13.	Pengelola Dokumen Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	Nurokhmah

No	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
14.	Pengadministrasi Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	Hindero Budijono
15.	Pranata Komputer Mahir pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	Ani Andriyani
16.	Pengelola Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	Bambang Sukriman
17.	Pengelola Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	Suwinarni

Plt. BUPATI PEMALANG  
WAKIL BUPATI,



MANSUR HIDAYAT

**Formulir E.70**  
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Pemalang**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		√	Tidak ada usulan dari musrenbang kecamatan	
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	√			

Pemalang, 3 Juli 2023  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PEMALANG



**KHAERON, S.H., M.M.**  
Pembina Tk I  
NIP. 19680323 199003 1 012



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

Pemalang, Agustus 2023  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PEMALANG



**KHAERON, S.H., M.M.**

Pembina Tk.I

NIP. 19680323-199003 1 012

## DAFTAR ISI

BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II.....	8
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU .....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.....	29
2.3. Hasil evaluasi SAKIP dan RB.....	38
2.4. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.....	40
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	45
2.6. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	61
BAB III.....	63
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	63
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	63
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	68
BAB IV .....	70
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	70
4.1 Program dan Kegiatan.....	70
BAB V.....	91
PENUTUP .....	91

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pelaksanaan Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi perubahan atas penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan melalui tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Berhasil tidaknya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana kualitas perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang merupakan dokumen tahunan yang mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu menjembatani antara perencanaan jangka menengah dan penganggaran tahunan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Rencana Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang secara substansial menjabarkan visi dan misi Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk tahun ke Tiga periode Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang diselaraskan dengan perencanaan dan sasaran pembangunan Nasional.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan melakukan Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi dengan Bappeda dan Pemangku kepentingan. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan Renja

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang -

Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

- 15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
- 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
- 22) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);

- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 );
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 9);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang tahun 2021 – 2026 (Lembaran daerah Kabupaten Pematang tahun 2021 nomor 6);
- 29) Peraturan Bupati Pematang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 68);
- 30) Peraturan Bupati Pematang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 27);
- 31) Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 38);
- 32) Peraturan Bupati Pematang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Bahwa maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang ini adalah untuk menyusun arah dan kebijakan SKPD pada Tahun Anggaran 2024 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026.

Dimana arah dan kebijakan SKPD harus dapat dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 yang disusun melalui prioritas program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diampunya. Prioritas program kegiatan dan sub kegiatan tersebut nantinya menjadi dasar pelaksanaan APBD Tahun 2024 guna dapat mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.

### 1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah:

- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada Tahun 2024.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas dibidang Penanaman Modal, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 dapat tercapai.
- c. Mengendalikan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan pelayanan perijinan secara terpadu pada Tahun 2024.

### 2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah untuk :

- a. Memberikan acuan bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2024 guna menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Memberikan tolok ukur guna pengukuran dan evaluasi kinerja selama Tahun 2024 bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
- c. Memberikan arah dan tujuan bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2024 guna mencapai tujuan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- 2.3 Hasil Evaluasi SAKIP dan RB
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- 2.5 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1 Program dan Kegiatan

##### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Dalam Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun keenam berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

Pada tahun anggaran 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi APBD penetapan Tahun 2022 sebesar Rp. 6.144.585.000, terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp. 5.889.250.000 dan belanja Modal Sebesar Rp. 255.335.000. Sedangkan pada perubahan anggaran mendapatkan tambahan sebesar Rp. 657.975.000., sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 6.802.560.000

• Belanja Operasi	Rp. 6.471.435.000
• Belanja Modal	<u>Rp. 331.125.000 +</u>
Total	Rp. 6.802.560.000

Anggaran yang diterima tersebut diupayakan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu guna memenuhi tuntutan masyarakat tentang pelayanan perijinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana yang disesuaikan dengan kewenangan, tuntutan dan kebutuhan daerah.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Renja tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel II.1 dibawah ini :

Tabel II.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2023	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	$8=(7/6*100\%)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4*100\%)$
<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>										
<b>Bidang Penanaman Modal</b>										
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	%	100	100	100	100	100	100	300	300
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	%	100	100	100	100	100	100	300	300
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	6	2	2	2	100	2	6	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2023	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	$8=(7/6*100\%)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4*100\%)$
	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Dokumen</i>	6	2	2	2	100	2	6	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100
	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD</i>	<i>Dokumen</i>	3	1	1	1	100	1	3	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100
	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD</i>	<i>Dokumen</i>	3	1	1	1	100	1	3	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2023	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	$8=(7/6*100\%)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4*100\%)$
	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD</i>	<i>Dokumen</i>	3	1	1	1	100	1	3	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100
	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD</i>	<i>Dokumen</i>	3	1	1	1	100	1	3	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100
	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi</i>	<i>Laporan</i>	3	1	1	1	100	1	3	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2023	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	$8=(7/6*100\%)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4*100\%)$
	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>									
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	6	2	2	2	100	2	6	100
	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Laporan</i>	6	2	2	2	100	2	6	100
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	Bulan	78	26	26	26	100	26	78	100
	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Orang/ Bulan</i>	78	26	26	26	100	26	78	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2023	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	$8=(7/6*100\%)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4*100\%)$
	disusun									
	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>laporan</i>	3	1	1	1	100	1	3	100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Dokumen	6	2	2	2	100	2	6	100
	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	<i>Dokumen</i>	6	2	2	2	100	2	6	100
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2023	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4*100%)
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Orang	540	180	180	0	0	180	360	66,6
	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan</i>	<i>Orang</i>	540	180	180	0	0	180	360	66,6
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Komponen listrik yang dibeli	Bulan	36	12	12	12	100	12	36	100
	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Paket</i>	36	12	12	12	100	12	36	100



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2023	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	$8=(7/6*100\%)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4*100\%)$
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan bahan logistik kantor yang dipenuhi	Bulan	36	12	12	12	100	12	36	100
	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>Paket</i>	36	12	12	12	100	12	36	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dipenuhi	Bulan	36	12	12	12	100	12	36	100
	<i>Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan</i>	<i>Paket</i>	36	12	12	12	100	12	36	100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang dipenuhi	Bulan	36	12	12	12	100	12	36	100
	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan</i>	<i>Dokumen</i>	36	12	12	12	100	12	36	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2023	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	$8=(7/6*100\%)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4*100\%)$
	<i>Perundang-Undangan yang Disediakan</i>									
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang di fasilitasi	Orang	561	51	255	35	13,7	255	341	60,7
	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Laporan</i>	36	12	12	12	100	12	36	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kali	560	140	255	73	28,6	210	423	75,5
	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Laporan</i>	560	140	255	73	28,6	210	423	75,5
<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2023	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	$8=(7/6*100\%)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4*100\%)$
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	Unit	61	13	24	9	37,5	24	46	75,4
	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Unit</i>	61	13	24	9	37,5	24	46	75,4
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	Surat	16.500	5.500	5.500	6.797	123,5	5.500	17.979	108,9
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Laporan</i>	36	12	12	12	100	12	36	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, publikasi, dan internet yang terpenuhi	Bulan	36	12	12	12	100	12	36	100
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,</i>	<i>Laporan</i>	36	12	12	12	100	12	36	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2023	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	$8=(7/6*100\%)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4*100\%)$
	<i>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>									
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non PNS setiap Bulan	Bulan	36	12	12	12	100	12	36	100
	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</i>	<i>Laporan</i>	36	12	12	12	100	12	36	100
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berizin dan dipelihara	Unit	63	21	21	29	138	21	71	112,6
	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>Unit</i>	63	21	21	29	138	21	71	112,6

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2023	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	$8=(7/6*100\%)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4*100\%)$
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	jenis dan Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit	45	15	15	32	213,3	15	62	137,7
	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>Unit</i>	45	15	15	32	213,3	15	62	137,7
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor yang dipelihara	Gedung	3	1	1	1	100	1	3	100
	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>Unit</i>	3	1	1	1	100	1	3	100
Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	99	33	33	50	151,5	33	116	117,1
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>Unit</i>	99	33	33	50	151,5	33	116	117,1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2023	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	$8=(7/6*100\%)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4*100\%)$
<b>Program Pengembangan Iklim penanaman Modal</b>	<b>Persentase Peningkatan jumlah investor</b>	%	<b>9</b>	<b>2,95</b>	<b>3</b>	<b>76,1</b>	<b>2.536,6</b>	<b>3.05</b>	<b>82,1</b>	<b>912,2</b>
<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah regulasi yang tersusun	Raperda/ Raperbup	4	2	2	3	150	2	7	175
	<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	<i>Dokumen</i>	4	2	2	3	150	2	7	175
<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta potensi Investasi</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Jumlah rancangan umum penanaman	Dokumen	1	1	1	1	100	0	2	200

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2023	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	$8=(7/6*100\%)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4*100\%)$
Kabupaten/Kota	modal yang tersusun									
	<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Dokumen</i>	1	1	1	1	100	0	2	200
<b>Program Promosi penanaman Modal</b>	<b>Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah nilai investasi</b>	<b>Rupiah</b>	<b>516.343 .903.886</b>	<b>168.157 .332.081</b>	<b>175132 .878.272</b>	<b>179.666 691.621</b>	<b>102,5</b>	<b>176.666 .093.083</b>	<b>524.490 .116.785</b>	<b>101,5</b>
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian strategis promosi penanaman modal yang tersusun	Dokumen	2	0	1	1	100	1	2	100
	<i>Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan</i>	<i>Dokumen</i>	2	0	1	1	100	1	2	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2023	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	$8=(7/6*100\%)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4*100\%)$
	<i>Kabupaten/ Kota</i>									
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi Penanaman Modal yang terlaksana	Kegiatan	3	1	1	2	200	1	4	133,3
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota</i>	<i>Dokumen</i>	3	1	1	2	200	1	4	133,3
<b>Program pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal</b>	<b>%</b>	<b>286</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>98,5</b>	<b>103,6</b>	<b>96</b>	<b>289,5</b>	<b>101,2</b>
<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perijinan yang disetujui</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah ijin terbit yang terpenuhi	Ijin Terbit	15.750	5000	5.250	14.251	271,4	5.500	24.751	157,1



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2023	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Pelaku Usaha</i>	15.750	5.000	5.250	14.251	271,4	5.500	24.751	157,1
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah cek lokasi yang terlaksana	Kali	720	240	240	154	64,1	240	634	88
	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal</i>	<i>Kegiatan Usaha</i>	720	240	240	154	64,1	240	634	88

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2023	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	$8=(7/6*100\%)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4*100\%)$
penyediaan Pelayanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengolahan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlaksana	Layanan Pengaduan	12	4	4	10	250	4	18	150
	<i>Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</i>	<i>Orang</i>	12	4	4	10	250	4	18	150
<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan</b>	<b>%</b>	<b>126</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>100</b>	<b>238</b>	<b>44</b>	<b>184</b>	<b>146</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2023	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	$8=(7/6*100\%)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4*100\%)$
	<b>kegiatan tepat waktu</b>									
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan Pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	Kali	44	22	22	15	68,1	22	59	134
	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Kegiatan Usaha</i>	44	22	22	15	68,1	22	59	134
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan	Kali	27	9	9	16	177,7	9	34	125,9

RENJA DPMPSTP TAHUN 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2023	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4*100%)
	penanaman modal yang terlaksana									
	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Pelaku Usaha</i>	27	9	9	16	177,7	9	34	125,9
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	Kali	39	13	13	13	100	13	39	100
	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan</i>	<i>Kegiatan Usaha</i>	39	13	13	13	100	13	39	100
<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase realisasi perijinan</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non</b>	<b>Persentase tersusunnya Data/</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2023	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	$8=(7/6*100\%)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4*100\%)$
<b>Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Informasi Pelayanan Perizinan</b>									
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	jumlah data/informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang tersedia	Data	3	1	1	1	100	1	3	100
	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	<i>Dokumen</i>	3	1	1	1	100	1	3	100

Dari tabel kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dapat di kategorikan Baik. Dapat dilihat dari 6 program yang ada, sebanyak 3 program mencapai kinerja 100%, dan ada 3 program yang capaiannya melebihi 100%. Capaian Kinerja yang sangat baik bisa dilihat di Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang mencapai 271,4%. Hal ini dikarenakan realisasi Ijin Terbit mencapai 14.251 ijin terbit dari target sebanyak 7.500 ijin terbit.

Untuk capaian kinerja dibawah 85% ada di sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, dan sub kegiatan Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal.

Adapun Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2022 secara ringkas dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan (PBG) sebesar Rp.1.212.174.142,- ( 101 %)
- b. Realisasi Belanja Operasi dan Modal Rp.6.569.737.257,- ( 96,58 %)

Dari data capaian retribusi ijin Persetujuan Bangunan Gedung diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan capaian, tahun 2021 realisasi hanya sebesar 85,03% diakrenakan tahun 2021 belum ada Perda terkait Persetujuan Bangunan Gedung. Sedangkan untuk capaian tahun 2022 sudah baik, dapat dilihat dari capaian kinerja mencapai 101,01%, hal ini sebabkan karena bulan maret tahun 2022 retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sudah dapat direalisasikan.

Adapun rincian Realisasi Pendapatan adalah sebagaimana Tabel II.2 dibawah ini :

**Table : II.2**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Realisasi Pendapatan Tahun 2022**

No	Jenis Perijinan	Retribusi Tahun 2021		Retribusi Tahun 2022		Ket
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	IMB/PBG	2.400.000.000	2.040.702.000	1.200.000.000	1.212.174.142	
2	Retribusi Izin Gangguan/ HO		-			
<b>Jumlah</b>		<b>2.400.000.000</b>	<b>2.040.702.000</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.212.174.142</b>	<b>101%</b>

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, merupakan salah satu Dinas yang mempunyai tugas Pokok “Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan pelayanan terpadu satu pintu pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pemalang menangani perijinan non berusaha sebanyak 20 jenis ijin. Sedangkan untuk perijinan berusaha menggunakan system OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Adapun jumlah realisasi perizinan yang dikeluarkan Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang dalam 2 tahun terakhir yaitu Tahun 2021 dan Tahun 2022 Sebagaimana tabel II.3

**Tabel II.3**  
**Realisasi Pelayanan Perizinan Tahun 2021 dan 2022**

No	Jenis Ijin	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
1	Pendaftaran Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-
2	Izin Usaha Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-
3	Izin Prinsip	78	63	1	-	-	-
4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	124	134	0	-	-	-
5	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	38	33	0	-	-	-
6	Izin Lokasi	15	15	0	-	-	-
7	Izin Pendirian Penitipan Anak Dan Kelompok Bermain	0	0	0	-	-	-
8	Izin Produksi Air Minum Dalam Kemasan	0	0	0	-	-	-
9	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga	5	4	0	-	-	-
10	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Hotel	0	0	0	-	-	-
11	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum	0	0	0	-	-	-
12	Sertifikasi Laik Sehat Hygiene Sanitasi Depot Air Minum	58	58	0	-	-	-
13	Sertifikasi Laik Hygiene Rumah Makan dan Restoran	1	0	0	-	-	-

No	Jenis Ijin	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
14	Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional	5	4	0	4	5	0
15	Izin Pemakaian Stadion Sirandu	0	0	0	2	2	0
16	Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo	0	0	0	5	5	0
17	Izin Reklame						
	-Izin Penyelenggaraan Reklame	320	320	0	326	326	0
	-Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Reklame	12	8	1	10	9	0
18	Rekomendasi Ijin Pendirian Kantor Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)/P4	1	1	0	-	-	-
	Rekomendasi Perusahaan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia	0	0	0	-	-	-
19	Izin Instalasi Listrik	0	0	0	-	-	-
20	Izin Pesawat Tenaga Dan Produksi/Disel	0	0	0	-	-	-
21	Izin Penyalur Petir	0	0	0	-	-	-
22	Izin Pesawat Lift	0	0	0	-	-	-
23	Izin Instalasi Kebakaran	0	0	0	-	-	-
24	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	0	0	0	-	-	-
25	Izin Usaha Angkutan	0	0	0	-	-	-
26	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	15	15	0	-	-	-
	Ijin Usaha Pariwisata pada Kawasan Wisata Pantai Widuri Pematang	0	0	0	-	-	-
27	Ijin Usaha Atau Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras	8	8	0	-	-	-
28	Izin Penyelenggaraan Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control)	0	0	0	-	-	-
29	Ijin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPPSBW)	0	0	0	-	-	-
30	Tanda Daftar Gudang (TDG)	6	6	0	-	-	-
	Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	24	24	0	-	-	-
	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	-	-	-	-	-
31	Izin Usaha Industri (IUI)	8	8	0	-	-	-
	Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	-	-	-	-	-	-
32	Surat Ijin Operasional Panti	5	5	0	3	2	0
33	Izin Pemakaman	35	35	0	20	20	0
34	Izin Pengabuan Mayat	18	18	0	18	18	0
35	Rekomendasi Ijin Unit Transfusi Darah	0	0	0	0	0	0
36	Izin Penyelenggaraan Optikal	0	0	0			
37	Izin Pendidikan Dasar	11	11	0	30	29	0
38	Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal						
	- Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	7	3	0	5	1	0
	- Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	0	0	0	3	3	0
39	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas C dan D	0	0	0	-	-	-



No	Jenis Ijin	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
	serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
	Izin Operasional Tetap Klinik	10	10	0	-	-	-
40	Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan						
	-Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	106	105	0	114	112	0
	-Surat Ijin Kerja Radiografer (SIKR)	23	20	0	18	20	0
	-Surat Ijin Prakter Dokter (SIP)	232	179	0	304	238	0
	-Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)	0	0	0			
	-Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	440	431	0	619	591	0
	-Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA)	160	160	0	96	86	0
	-Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	46	46	0	101	91	0
	-Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	0	0	0	12	12	0
	-Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	5	5	0	9	7	0
	-Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	29	27	0	35	37	0
	-Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	3	3	0	7	7	0
	-Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	8	8	0	18	18	0
	-Surat Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan	49	48	0	29	29	0
	-Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	195	189	0	1061	991	0
	-Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	36	33	0	33	31	0
	-Surat Izin Kerja Perekam Medis	17	17	0	30	28	0
	-Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	4	4	0	4	4	0
	-Surat Izin Tukang Gigi	0	0	0	1	1	0
	-Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)	0	0	0	1	1	0
	-Surat Izin Kerja Terapis Wicara	0	0	0	2	2	0
	-Surat izin praktik psikolog Klinis (SIPPK)	0	0	0	1	1	0
41	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	0	0	0	-	-	-
42	Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan Kelas I dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I	0	0	0	-	-	-
43	Izin Apotek, Toko Obat dan Toko Alat Kesehatan				-	-	-
	- Izin Apotek (SIA)	85	85	0	-	-	-
	- Izin Toko Obat	3	3	0	-	-	-
	- Izin Toko Alat Kesehatan	0	0	0	-	-	-
44	Izin Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga (PIRT)	231	230	0	-	-	-
45	Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	1	0	0	-	-	-
46	Izin Pemakaian Alun-alun				0	0	0
47	Izin Pemakaian Taman Patih Sampun	0	0	0	0	0	0
48	Izin Pembangunan dan	0	0	0	-	-	-

No	Jenis Ijin	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
	Pengembangan Perumahan						
49	Sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)	0	0	0	-	-	-
50	Izin Pembangunan dan Pengembangan Permukiman	0	0	0	-	-	-
51	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
52	Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	0	0	0	-	-	-
53	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0	-	-	-
54	Izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)				-	-	-
	1. Izin Pembuangan Limbah Cair	1	1	0	-	-	-
	2. Izin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	4	3	0	-	-	-
	3. Izin Pengumpulan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) skala Kabupaten	0	0	0	-	-	-
	Izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta	0	0	0	-	-	-
55	Izin Pengesahan dan registrasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	81	81	0	-	-	-
56	Persetujuan permohonan pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah industri di rumah sakit, hotel dan pabrik	0	0	0	-	-	-
57	Izin Lingkungan	6	6	0	-	-	-
58	Izin Membuka Tanah	0	0	0	-	-	-
59	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	160	160	0	-	-	-
60	Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	0	0	0	-	-	-
61	Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	119	117	0	79	80	0
62	Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	-	-	-
63	Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten	0	0	0	-	-	-
64	Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada	0	0	0	-	-	-

No	Jenis Ijin	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
65	Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha	0	0	0	-	-	-
66	Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan	0	0	0	-	-	-
	Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha	0	0	0	-	-	-
67	Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	0	0	0			
68	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan local	0	0	0	-	-	-
69	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	0	0	0	-	-	-
70	Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul local	0	0	0	-	-	-
71	Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan local	0	0	0	-	-	-
72	Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan local	0	0	0	-	-	-
73	Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	0	0	0	0
74	Izin Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan local	0	0	0	0	0	0
75	Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan local	0	0	0	-	-	-
76	Izin Mendirikan Bangunan tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	0	0	0	-	-	-
77	Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0	-	-	-
78	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0	-	-	-
79	Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta	0	0	0	-	-	-

No	Jenis Ijin	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
	api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten						
80	Izin Insidentil	0	0	0	0	0	0
81	Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	6	6	0	-	-	-
	Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	1	1	0	-	-	-
82	Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	-	-	-
83	Izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro	5.249	5.249	0	11296	11297	0
84	Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi	0	0	0	0	0	0
85	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha	0	0	0	127	117	0
86	Surat Keterangan Penelitian (SKP)	0	0	0	8	5	0
87	Izin Operasional Puskesmas	0	0	0	25	25	0
	Izin Usaha Peternakan	0	0	0	-	-	-
	Tanda Daftar Usaha Peternakan	3	3	0	-	-	-
	Izin Praktek Dokter Hewan	0	0	0	-	-	-
	Izin Klinik Hewan	0	0	0	-	-	-
88	Izin Usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan	0	0	0	-	-	-
89	Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	0	0	0	-	-	-
90	Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat	0	0	0	-	-	-
91	Izin Usaha Toko Modern	0	0	0			
92	Izin Perluasan Usaha Industri (IPI) bagi industri kecil dan menengah	0	0	0	-	-	-
93	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0	0	0	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.119</b>	<b>8.014</b>	<b>3</b>	<b>14.456</b>	<b>14.251</b>	<b>0</b>

Dari data capaian retribusi ijin Persetujuan Bangunan Gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan capaian, tahun 2021 realisasi hanya sebesar 85,03% diakrenakan tahun 2021 belum ada Perda terkait Persetujuan Bangunan Gedung. Sedangkan untuk capaian tahun 2022 sudah baik, dapat dilihat dari capaian kinerja mencapai 101,01%, hal ini sebabkan karena bulan maret tahun 2022 retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sudah dapat direalisasikan.

Selain capaian kinerja pelaksanaan kegiatan maupun keuangan sebagaimana tersebut diatas juga adanya capaian terhadap kinerja SKPD yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dapat memenuhi target Indikator Kinerja Utama dengan maksimal yaitu Persentase peningkatan investasi (PMA dan PMDN) 4,64% dari target 2%, realisasi Nilai IKM 87,97 dari target 83,80, hal ini dikarenakan :

- a) Membuat kajian – kajian secara terus menerus terhadap regulasi yang ada untuk memudahkan investor untuk berinvestasi.
- b) Adanya Pengusaha yang melaporkan usahanya melalui LKPM meskipun tingkat kesadaran pengusaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal melalui LKPM belum optimal .

Berikut adalah realisasi atau capaian kinerja berdasarkan target RPJMD, Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Pematang Siabu**

No	Indikator	SPM * nasion al	IKU	Target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Siabu				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat ata n An alli sis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase peningkatan investasi (PMA dan PMDN)		Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	2%	3%	4%	5%	4,64	-	4%	5%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan	83,8	84,0	84,2	84,4	87,97	-	84,2	84,4	
3	Persentase peningkatan jumlah investor			3,00	3,05	3,10	3,15	76,19	-	3,10	3,15	
4	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal			100	100	100	100	100	-	100	100	
5	Persentase terselenggaranya pelayanan perijinan dan non peijinan penanaman modal			95	96	96	97	98,58	-	96	97	
6	Persentase pelakuusaha yang memberikan pelaporan tepat waktu			42	44	46	48	100	-	46	48	
7	Persentase realisasi perizinan			100	100	100	100	190,01	-	100	100	
8	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)			36	37	38	39	37	-	38	39	

No	Indikator	SPM * nasion al	IKU	Target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat ata n An alli sis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahu n 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			171.520. 478.722	176.666. 093.083	183.732. 736.806	192,919, 373,646	179.666. 691.621	-	183.732.7 36.806	192,9 19,37 3,646	

### 2.3 Hasil evaluasi SAKIP dan RB

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan Evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen yang digunakan sebagai data pendukung evaluasi antara lain laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022, Rencana Strategis Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Renja tahun 2022 dan tahun 2023, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023, serta dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang memperoleh nilai skor **63,40** dengan kategori **B** (Baik). Penilaian tersebut menunjukkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu perbaikan tidak mendasar. Nilai B merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel II.5**  
**Hasil Evaluasi SAKIP**

Komponen SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Kabupaten Pemalang		
	No: 700/49/EVS/2021 Tgl: 4 Agustus 2021	No: 700/4/EVS/2022 Tgl: 27 Juni 2022	No: 700/024/EVS/VI/2023 Tgl: 16 Juni 2023
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Perencanaan Kinerja	22,18	21,6	21
Pengukuran Kinerja	10,31	18	18,9
Pelaporan Kinerja	7,59	10,5	9,75
Evaluasi Internal	2,74	11,5	13,75
Capaian Kinerja	14,25	Tidak termasuk komponen SAKIP pada Tahun 2022, sesuai permenpan RB	Tidak termasuk komponen SAKIP pada Tahun 2022, sesuai permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021



		Nomor 8 Tahun 2021	
<b>Nilai SAKIP</b>	<b>57,08</b>	<b>61,15</b>	<b>63,40</b>

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, telah dilakukan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya.

Dokumen yang digunakan sebagai data pendukung evaluasi antara lain terdiri dari 8 Area Penilaian diantaranya Area Manajemen Perubahan, Area Deregulasi Kebijakan, Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur, Area Penguatan Akuntabilitas, Area Pengawasan, dan Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 202 menunjukkan bahwa Dinas DPMPSTP Kabupaten Pematang Jaya memperoleh nilai skor terbaik dengan peringkat terbaik diantara Perangkat Daerah lain dengan nilai **22,64**. Penilaian tersebut menunjukkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya memiliki Reformasi Birokrasi yang cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu perbaikan tidak mendasar. Nilai skor **22,64** merupakan Jumlah akumulasi penilaian terhadap komponen Pemenuhan sebesar **9,14** dan Komponen Reform sebesar **13,50** manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel II.6**

**Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020, 2021 dan 2022**

No	Komponen	Bobot	Pemenuhan dan Reform		
			2020	2021	2022
<b>Pemenuhan</b>					
1	Area Manajemen Perubahan	2,00	1,20	1,27	1,35
2	Area Deregulasi Kebijakan	1,00	0,50	0,50	0,50
3	Area Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	0,92	0,58	1,17
4	Area Penataan Tata Laksana	1,00	0,64	0,64	0,22
5	Area Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur	1,40	0,94	0,89	1,00

6	Area Pengatan Akuntabilitas	2,50	2,01	2,01	1,68
7	Area Pengawasan	2,20	1,85	1,62	1,18
8	Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	1,80	1,78	2,04
<b>Total</b>		<b>14,60</b>	<b>9,29</b>	<b>9,86</b>	<b>9,29</b>
<b>Reform</b>					
1	Area Manajemen Perubahan	3,00	2,54	2,54	0,82
2	Area Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	2,00	1,50
3	Area Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	1,50	0,75
4	Area Penataan Tata Laksana	3,75	3,59	3,59	1,81
5	Area Penataan Sistim Manajemen SDM aparatur	2,00	1,25	1,00	1,25
6	Area Pengatan Akuntabilitas	3,75	2,42	2,17	2,09
7	Area Pengawasan	1,95	1,95	1,83	1,95
8	Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,64	3,22	3,34
<b>Total</b>		<b>2,70</b>	<b>17,85</b>	<b>18,88</b>	<b>17,85</b>
<b>Jumlah</b>		<b>100%</b>	<b>27,13</b>	<b>28,74</b>	<b>27,13</b>

## 2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

### 2.4.1 Permasalahan dan hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mempunyai satu urusan yaitu Penanaman Modal. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang dihadapi adalah :

1. Belum diimplementasikannya pemberian insentif bagi investor
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal dan pelayanan mal pelayanan public (MPP)
3. Belum optimalnya kegiatan promosi dan pemasaran penanaman modal

4. Belum memadainya data dan informasi terkait profil dan peluang investasi, lahan dan peta kawasan peruntukan industri serta infrastruktur pendukungnya
5. Belum disesuaikan kebijakan rencana pengembangan penanaman modal daerah dengan regulasi yang baru
6. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha tentang pengisian dan penyampaian LKPM
7. Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha untuk memberikan pelaporan kegiatan usaha dan pekungannya tepat waktu

Berkaitan dengan hal tersebut, guna untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul maka perlu dirumuskan kebijakan masing-masing Perangkat Daerah guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk merealisasikan Visi dan Misi Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang periode Tahun 2021 – 2026.

Salah satu isu nasional yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka peluang investor untuk masuk ke Kabupaten Pemalang semakin terbuka lebar. Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang perlu meningkatkan kinerja dari segi peningkatan kualitas SDM, sarana, dan prasarana dalam memberikan pelayanan terhadap Investor.

Penanaman Modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan non perijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolannya sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

**Tujuan Penanaman Modal adalah :**

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
4. Meningkatkan daya saing dunia usaha nasional
5. Meningkatkan kepastian dan kemampuan teknologi nasional
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan

7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Kebijakan Dasar Penanaman Modal**

1. Pengembangan iklim Penanaman Modal
2. Promosi Penanaman Modal
3. Pelayanan Penanaman Modal
4. Pengelolaan data dan system informasi Penanaman Modal
5. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal, dan
6. Pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka sangat berdampak positif untuk ikut meningkatkan kemakmuran /kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pemalang terkait investasi yaitu harus siap untuk menghadapi persaingan global dalam usaha menarik investor untuk berinvestasi. Isu strategis pada lingkup tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yaitu perlu untuk mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan investasi maka perlu adanya langkah-langkah yang kongkrit/nyata.

Adapun langkah- langkah yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan promosi penanaman modal investasi belum optimal dalam rangka meningkatkan penanaman modal :

Didukung 2 program

- a) Program Pengembangan iklim Penanaman Modal.

Indikatornya : Persentase peningkatan jumlah investor.

- b) Program Promosi Penanaman Modal

Indikatornya : Persentase terlaksananya promosi penanaman modal

2. Belum memadainya data dan informasi terkait profil dan peluang investasi, lahan dan peta kawasan peruntukan industri serta infrastruktur pendukungnya :

Didukung 1 Program

- a) Program Promosi Penanaman Modal

Indikatornya : Persentase terlaksananya promosi penanaman modal

3. Belum disesuaikan kebijakan rencana pengembangan penanaman modal daerah dengan regulasi yang baru:

Didukung 1 program

a) Program Pengembangan iklim Penanaman Modal.

Indikatornya : Persentase peningkatan jumlah investor.

4. Belum optimalnya pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam mal pelayanan publik

Didukung 2 program

a) Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikatornya : Presentase terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal

b) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikatornya : Presentase realisasi perijinan

#### 2.4.2 Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan

Dengan di keluarkanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang membuat dan mengatur proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat maka di harapkan akan memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi di Kabupaten Pematang.

Isu lainnya yang perlu menjadikan perhatian juga adalah dengan adanya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Permenpan RB tersebut berisi tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang di laksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengampu tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mal Pelayanan Publik Telah dibangun dan resmi lounching pada tanggal 20 Desember 2022, bertempat di Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang. Untuk sementara layanan yang di sediakan sebanyak 14 layanan dengan 67 ijin yang dilayani. Belum optimalnya Mal Pelayanan Publik ini maka masih perlu adanya pengembangan lebih lanjut lagi di tahun berikutnya dengan menambah jumlah layanan dan ijin yang di layani.

**Tabel. II.7**  
**Analisis SWOT**

<p><b>ISU STRATEGIS</b></p>	<p><b>KEKUATAN (STRENGHT)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Potensi peluang investasi di berbagai sektor dan daya dukung investasi di Kabupaten Pematang</li> <li>Ditetapkannya Kawasan Peruntukan Industri melalui Perda Kabupaten Pematang No 1 Tahun 2018 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2018-2038</li> <li>Tersedianya sarana dan prasarana Sistem Informasi Investasi (Gerai Investasi)</li> </ol>	<p><b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Upaya peningkatan promosi penanaman modal investasi belum optimal dalam rangka meningkatkan penanaman modal</li> <li>Upaya meningkatkan informasi terkait profil dan peluang investasi, lahan dan peta kawasan peruntukan industri serta infrastruktur pendukungnya</li> <li>Belum optimalnya pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam mal pelayanan publik</li> </ol>
<p><b>PELUANG (OPPORTUNITY)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dukungan Pemerintah melalui terbitnya UU Cipta Kerja</li> <li>Pengembangan Mall Pelayanan Publik</li> <li>Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat pesat sebagai media promosi Penanaman Modal</li> </ol>	<p><b>STRATEGI SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Promosi Penanaman Modal</li> <li>Peningkatan Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</li> </ol>	<p><b>STRATEGI WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi</li> <li>Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal</li> </ol>
<p><b>TANTANGAN (THREAT)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya konflik kepentingan baik social ekonomi maupun lingkungan dalam pelaksanaan penanaman modal</li> <li>Belum memadainya data dan informasi terkait profil dan peluang investasi, lahan dan peta kawasan peruntukan industri serta infrastruktur pendukungnya</li> <li>Tidak terkendalinya harga tanah pada kawasan peruntukan industri</li> </ol>	<p><b>STRATEGI ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> </ol>	<p><b>STRATEGI WT</b></p>

## 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam upaya pencapaian target pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 disusun berdasarkan kerangka kebijakan mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Bupati terpilih yaitu :

**Visi : “ TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG ADIL, MAKMUR, AGAMIS DAN NGANGENI”**

**Misi ada 6 yaitu :**

1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan Bersih.
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong.
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan.
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal.
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan Berkesinambungan.

Sejalan visi dan misi tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati ke 2 yaitu “ **MAKMUR** “ dan Misi ke 5 yaitu “**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Lokal**“

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. (Program Unggulan : DEWI = Desa Wisata , KOIN= Kota Industri).

Guna mencapai tujuan pembangunan daerah Tahun 2024 keterkaitan Isu Strategis , prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 diarahkan pada “Peningkatan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada penguatan ekonomi kearifan lokal dan SDM yang berdaya saing didukung dengan infrastruktur yang merata”, meliputi :

1. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas;
2. Fasilitasi kemandirian desa dalam mewujudkan Desa Sinergi;
3. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota;

4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;
5. Penanganan kemiskinan dengan pemberian jaminan sosial, perlindungan dan rehab sosial serta peningkatan keterampilan pada penduduk miskin yang terdampak Covid-19;

Memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 jika dikaitkan dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, maka prioritasnya adalah Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas dengan focus pada Peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan, pengembangan iklim penanaman modal, memberikan informasi peta potensi investasi, peningkatan promosi investasi, pembangunan mall pelayanan publik, kemudahan perizinan dan pemberian insentif pada investor.

Adapun guna untuk merealisasikan prioritas tersebut perlu disusun program dan kegiatan untuk mendukungnya, dimana berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disusun program, Kegiatan dan sub kegiatan masih mengacu pada program dan kegiatan tahun berjalan atau tahun2022.



**Tabel II.8**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2024**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>7.274.935.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>7.274.935.000</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>77,240,750</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>7,240,750</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6,435,450	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6,435,450	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			RKASKPD								
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	8.520.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	8.520.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	6.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	7.380.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	7.380.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	31,405,300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	31,405,300	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>3,632,785,000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>3,632,785,000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	3,615,594,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	3,615,594,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	10.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	7,191,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	7,191,000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<b>Perangkat Daerah</b>					<b>Perangkat Daerah</b>			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>412,589,500</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>412,589,500</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10,800,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10,800,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	189,650,900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	189,650,900	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PMPTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	37,083,800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PMPTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	37,083,800	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Dokumen	6.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peraturan Perundang-undangan		Perundang-Undangan yang Disediakan			Perundang-undangan		Perundang-Undangan yang Disediakan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3,330,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3,330,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	165,724,800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	165,724,800	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>141,940,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>141,940,000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	<b>141,940,000</b>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	<b>141,940,000</b>	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>779,741,000</b>	<b>enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>779,741,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9,450,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9,450,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	244,987,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	244,987,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	525,304,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	525,304,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.230.638.750</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.230.638.750</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	146,888,750	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	146,888,750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dinas Operasional atau Lapangan					atau Lapangan					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	83,750,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	83,750,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah investor</b>	<b>3,10%</b>	<b>175.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL enetapan Pemberian</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah investor</b>	<b>3,10%</b>	<b>175.000.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	100.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	100.000.000	
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase tersusunnya dokumen Peta Potensi Investasi</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase tersusunnya dokumen Peta Potensi Investasi</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.000</b>	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal	1 Dokumen	75.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/	1 Dokumen	75.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Modal Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota					Kota			
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>700.000,000</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>700.000,000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Jumlah nilai investasi</b>	<b>187.602.339.205</b>	<b>700.000,000</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Jumlah nilai investasi</b>	<b>187.602.339.205</b>	<b>700.000,000</b>	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	550.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	550.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal</b>	<b>96%</b>	<b>595.000.000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal</b>	<b>96%</b>	<b>595.000.000</b>	
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase perijinan yang disetujui</b>	<b>100%</b>	<b>595.000.000</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase perijinan yang disetujui</b>	<b>100%</b>	<b>595.000.000</b>	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.000 Pelaku Usaha	500.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.000 Pelaku Usaha	500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Terintegrasi secara Elektronik										
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	240 Kegiatan Usaha	80,000,000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	240 Kegiatan Usaha	80,000,000	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	7 Orang	15,000,000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	7 Orang	15,000,000	
	<b>PROGRAM PENGENDALI</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang</b>	<b>46%</b>	<b>633.900.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang</b>	<b>46%</b>	<b>633.900.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>AN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu</b>			<b>PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu</b>			
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>633.900.000</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>633.900.000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Kegiatan Usaha	300.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Kegiatan Usaha	300.000.000	
	oordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan	9 Pelaku Usaha	300,000,000	oordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	9 Pelaku Usaha	300,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Modal		Penanaman Modal								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	13 Kegiatan Usaha	33,900,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	13 Kegiatan Usaha	33,900,000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase realisasi perijinan</b>	<b>100%</b>	<b>40,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase realisasi perijinan</b>	<b>100%</b>	<b>40,000,000</b>	
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan</b>	<b>100%</b>	<b>40,000,000</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan</b>	<b>100%</b>	<b>40,000,000</b>	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan	Dinas PMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	1 Dokumen	40,000,000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data	Dinas PMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	1 Dokumen	40,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>9.418.835.000</b>					<b>9.418.835.000</b>	

## 2.6 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, mempunyai tugas pokok melaksanakan pemerintahan di bidang urusan penanaman modal dengan fungsi Perumusan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berasal dari 2 item, yang pertama dari tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan yang kedua dari hasil pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut ini usulan dari masyarakat melalui mekanisme Survei Kepuasan Masyarakat dan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 :

- a. Survei Kepuasan Masyarakat :
  1. Untuk lebih meningkatkan lagi kecepatan waktu pelayanan
  2. Tempat duduk pemohon kurang
  3. Tidak adanya kotak saran
  4. Jam pelayanan hanya setengah hari
  5. Tempat parkir kurang luas
- b. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 :
  1. Perlu segera dilakukan pengembangan Mal Pelayanan Publik tahap 2 sehingga bisa menambah jumlah instansi yang bergabung dalam MPP.
  2. Menambah kapasitas internet, perluasan area parkir dan menyediakan perangkat computer, printer dan sarpras pendukung lainnya secara bertahap.
  3. Perlunya penyusunan regulasi (Peraturan Bupati) terkait pemberian insentif.
  4. Perlu melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyampaian LKPM kepada pelaku usaha.

Dari hasil usulan masyarakat diatas maka tidak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan malakukan peningkatan kualitas pelayanan yang

akan di akomodir pada Sub Kegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Sedangkan untuk pendampingan pengisian pelaporan LKPM akan di akomodir pada Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal.



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

##### **1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui 9 misi pembangunan yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- 9) Sinergi pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatua;

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan Tujuh agenda pembangunan nasional yang dikenal sebagai Nawa Cita kedua, memperhatikan Nawa Cita Kedua tersebut yang menjadi prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya untuk tahun 2024 yaitu **“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”**.

##### **2. Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Investasi/ BKPM**

Visi yang dirumuskan adalah :

**“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8

(delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut :

Misi (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;

Misi (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Sementara itu BKPM juga diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: pertama adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pertama: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs),
- b) Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing

- c) Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal
  - d) Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal,
  - e) Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal,
  - f) Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal,
  - g) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut:
- a) Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja
  - b) Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal
  - c) Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi,
  - d) Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar
  - e) Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor,
  - f) Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar
  - g) Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri

### **3. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah ( DPMPSTP Provinsi Jawa Tengah )**

Sedangkan telaahan terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah 2018- 2023 yang menjadi arah Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Di dalam misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut :

1. Misi Ke-2 yaitu Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).

Strategi :

- Membangun open government melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik, termasuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- Membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja;

- Meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP, perkuatan SPIP, serta zona integritas;
  - Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
  - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja;
  - Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).
2. Misi Ke-3 yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Tujuan : Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berdaya saing, berbasis potensi unggulan daerah, dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan secara menyebar, inklusif, dan berkualitas

Strategi : Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif melalui:

- Pemberian kemudahan perizinan investasi
- Memperbaiki sistem dan layanan perizinan mudah, murah, cepat, tepat, dan transparan;
- Mengembangkan digital investment promotion;
- Mengembangkan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota;
- Mendorong perwujudan investasi hijau.

Dari telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi jika menilik dari tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 telah sejalan.

#### **4. Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang**

prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 diarahkan pada “Peningkatan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada penguatan ekonomi kearifan lokal dan SDM yang berdaya saing didukung dengan infrastruktur yang merata”, meliputi :

1. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas;
2. Fasilitasi kemandirian desa dalam mewujudkan Desa Sinergi;
3. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota;
4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;

5. Penanganan kemiskinan dengan pemberian jaminan sosial, perlindungan dan rehab sosial serta peningkatan keterampilan pada penduduk miskin yang terdampak Covid-19;

Memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 jika dikaitkan dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, maka prioritasnya adalah Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas dengan focus pada Peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan, pengembangan iklim penanaman modal, memberikan informasi peta potensi investasi, peningkatan promosi investasi, pembangunan mall pelayanan publik, kemudahan perizinan dan pemberian insentif pada investor.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 mengacu pada tahun ketiga penjabaran pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang diarahkan pada **“Peningkatan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada penguatan ekonomi kearifan lokal dan SDM yang berdaya saing didukung dengan infrastruktur yang merata”**, dengan prioritas pada :

1. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas;
2. Fasilitasi kemandirian desa dalam mewujudkan Desa Sinergi;
3. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota;
4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;
5. Penanganan kemiskinan dengan pemberian jaminan sosial, perlindungan dan rehab sosial serta peningkatan keterampilan pada penduduk miskin yang terdampak Covid-19;

Apabila mempertimbangkan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang pada Tahun 2024, maka Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah :

1. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global.
2. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan melalui kecepatan, kemudahan, kepastian hukum dan transparansi proses perizinan serta Implementasi pemberian insentif penanaman modal untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Pemalang.
3. Pemutahiran data dan informasi terkait profil potensi, peluang dan daya dukung investasi serta informasi terkait dengan perijinan dan non perijinan.

4. Peningkatan kerjasama dengan lembaga promosi investasi luar daerah.
5. Meningkatkan promosi potensi unggulan di Kabupaten Pematang dan produk – produk UMKM dengan melakukan pameran, promosi melalui website gerai investasi dan media sosial lainnya.
6. Peningkatan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha tentang pengisian dan penyampaian LKPM.
7. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Tujuan dan Sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah dalam mendukung Pelaksanaan penjabaran visi dan misi Bupati Pematang. Perwujudan Pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur guna mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung misi ke 5 yaitu “Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal“ Dan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ), disebutkan salah satu prioritas pembangunan Tahun 2024 adalah Peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan, pengembangan iklim penanaman modal, memberikan informasi peta potensi investasi, peningkatan promosi investasi, pembangunan mall pelayanan publik, kemudahan perizinan dan pemberian insentif pada investor.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pematang tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, seperti diuraikan pada Tabel III.1 dibawah ini :

Tabel III.1  
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Realisasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Realisasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan Investasi (PMA dan PMDN)	%	4
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,2

Adapun langkah- langkah yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam mengatasi Permasalahan dan isu Strategis Pada tahun 2024 sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemberian informasi daya tarik investasi daerah :  
Didukung 2 program
  - a) Program Pengembangan iklim Penanaman Modal.  
Indikatornya : Persentase peningkatan jumlah investor.
  - b) Program Promosi Penanaman Modal  
Indikatornya : Persentase terlaksananya promosi penanaman modal
2. Optimalisasi Perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal :  
Didukung 1 program
  - a) Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal  
Indikatornya : Presentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu
3. Optimalisasi pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam mal pelayanan publik  
Didukung 2 program
  - a) Program Pelayanan Penanaman Modal  
Indikatornya : Presentase terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal
  - b) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal  
Indikatornya : Presentase realisasi perijinan

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Perangkat Daerah yang menjadi bidang tugasnya.

Disamping kedudukan yang demikian, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024 diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat serta mempunyai tolok ukur guna pencapaian arah kebijakan, visi dan misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang juga mendukung program unggulan bupati yaitu Kota Industri (KOIN). Melalui program pengembangan iklim penanaman modal dan program promosi penanaman modal diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan informasi tentang peta potensi penanaman modal di kabupaten pemalang.

Sedangkan kedudukan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang harus selaras dengan sasaran dan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024. Dimana rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan dan 4 (empat) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam RKPD Tahun 2024 yaitu mengampu **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Penanaman Modal :**

Permasalahan di bidang penanaman modal yang menjadi prioritas pembangunan daerah :

1. Belum terintegrasinya pelayanan perijinan baik pusat dan daerah dalam satu tempat (Belum Terpadu satu pintu). Program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :



- a) Program urusan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota
2. Belum Optimalnya Promosi Penanaman Modal. Program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :
  - a) Program promosi penanaman modal
3. Belum optimalnya pemberian informasi (Profil Potensi Investasi, Lahan dan Peta Kawasan Industri serta Infrastruktur Pendukung ). Program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :
  - a) Program promosi penanaman modal
4. Belum terimplementasinya pemberian insentif bagi investor dan Belum optimalnya Perencanaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :
  - a) Program pengembangan iklim penanaman modal
  - b) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
5. Belum Optimalnya kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal. Program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :
  - a) Program Pelayanan penanaman modal

Dari lima permasalahan diatas, maka rincian program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah :

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - 3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
    - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
    - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    - 1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
  - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    - 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    - 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
    - 2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- d. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
    - 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
    - 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

- 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- e. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- f. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik

**Tabel 4.1**  
**MATRIK RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PEMALANG**  
**TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASION AL	DAERA H					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						4.353.534.900, 00							6.164.938.000, 00		
	2	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.353.534.900, 00							6.164.938.000, 00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENANAMAN MODAL						533.900.000,0 0							833.900.000,0 0		
1.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANG AN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Peningkatan jumlah investor</i>	-			3,10 %	9.970.000,00						-	1.110.000,00		

2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal</i>	-			100 %	4.995.000,00			-	1. Pembangunan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-	-	555.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01.001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
		<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>				1 Dokumen	4.995.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		555.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta potensi Investasi</i>	-			100 %	4.975.000,00			-	1. Pembangunan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-	-	555.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02.001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
		<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman</i>				1 Dokumen	4.975.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		555.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

			Modal Daerah Kabupaten/Kota						Kel/Desa		as				SATU PINTU
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal	-			4 % 100 %	80.030.000,00					-	240.220.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nilai investasi	-			183.732.736.806 Rupiah	80.030.000,00			-	1. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas	-	240.220.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	60.000.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas	-	94.789.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota													

			<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>				1 Dokumen	20.030.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		145.431.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase terselenggaranya Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal</b>	-			96 %	76.000.000,00						-	210.000.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase perijinan yang disetujui</i>	-			100 %	76.000.000,00			-	1. Pembangunan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-	-	210.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				4000 Pelaku Usaha	53.000.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		115.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														

			<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				5 Pelaku Usaha	3.000.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan produk aktivitas ekonomi yang berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>				130 Kegiatan Usaha	20.000.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan produk aktivitas ekonomi yang berkualitas	-		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b><i>persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu</i></b>	-			46 %	343.900.000,00						-	342.570.000,00	



2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Prosentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	-			100 %	343.900.000,00			-	1. Pemanfaatan produk aktivitas ekonomi yang berkualitas	-	-	342.570.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
		<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>				10 Kegiatan Usaha.	50.350.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan produk aktivitas ekonomi yang berkualitas	-		8.670.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
		<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>				9 Pelaku Usaha	254.650.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan produk aktivitas ekonomi yang berkualitas	-		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														

			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>				13 Kegiatan Usaha	38.900.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan produk-produk unggulan yang berkualitas	-		33.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase realisasi perijinan</b>	-			100 %	24.000.000,00						-	40.000.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan</i>	-			100 %	24.000.000,00			-	1. Pemanfaatan produk-produk unggulan yang berkualitas	-	-	40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														

			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>			1 Dokumen	24.000.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						3.819.634.900,00							5.331.038.000,00	

1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	3.819.634.900,00						-	5.331.038.000,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Prosentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-			100 %	45.046.400,00			-	5. Penanganan kemiskinan dengan pemberian jaminan sosial, perlindungan dan rehabilitasi sosial serta peningkatan keterampilan pada penduduk miskin yang terdampak Covid-19;	-	-	77.240.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	3.307.000,00	- Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penanganan kemiskinan dengan pemberian jaminan sosial, perlindungan dan rehab sosial serta peningkatan keterampilan pada penduduk miskin yang terdampak Covid-19;		6.435.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	9.000.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan produktivitas ekonomi yang berkualitas		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													

RENJA DPMPSTP TAHUN 2024

		<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	4.691.300,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembanguan produktivitas ekonomi yang berkualitas	-		8.520.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

		<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	4.500.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembanguan produktivitas ekonomi yang berkualitas	-		6.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD														
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.618.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembanguan produktivitas ekonomi yang berkualitas	-		7.380.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	3.365.350,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	14.564.750,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		31.405.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Prosentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan</i>	-				100 %	2.798.907.500,00			-	1. Pemanfaatan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-	-	3.632.785.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

RENJA DPMPSTP TAHUN 2024

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				25 Orang/bulan	2.785.204.500,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembanguan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		3.615.594.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	9.000.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembanguan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				2 Dokumen	4.703.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembanguan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		7.191.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Prosentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 %	204.133.500,00			-	1. Pembanguan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-	-	412.589.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																

			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	3.010.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunaan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		10.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	73.119.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunaan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		189.650.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	10.576.500,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunaan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		37.083.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	3.800.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunaan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														



RENJA DPMPSTP TAHUN 2024

			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		3.330.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				75 Laporan	111.628.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		165.724.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Prosentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			100 %	634.723.500,00			-	1. Pemanfaatan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-	-	779.741.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		9.450.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	149.215.500,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		244.987.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	483.508.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		525.304.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Prosentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah</i>	-				100 %	136.824.000,00			-	1. Pemban gunan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-	-	428.681.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>					29 Unit	99.940.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		146.888.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>					32 Unit	26.850.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		83.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

RENJA DPMPSTP TAHUN 2024

		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	10.034.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembanguan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		198.043.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>						<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Prosentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	0,00			-	1. Pembanguan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembanguan prod uktivitas ekonomi yang berkualitas	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>Jumlah</b>							<b>4.353.534.900,00</b>							<b>6.164.938.000,00</b>	

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2024 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam menunjang Tugas dan Fungsinya serta mendukung Program Unggulan Bupati Kota Industri (KOIN) terdiri dari 6 Program 12 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024 merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024 memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Demikian Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024.



Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan Indikator lama	Target Lama							Kode Rekening (Pemutakhiran SIPD-RI)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran SIPD-RI)	Indikator (Pemutakhiran SIPD-RI)	Satuan Indikator Baru	Target Baru							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	12	12	12	12	12	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	2	2	2	2	2	2	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	2	2	2	2	2	2	2
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	paket	12	12	12	12	12	12	12	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	paket	12	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	12	12	12	12	12	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	140	210	210	210	210	210	210	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	140	210	210	210	210	210	210	210
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	2.18.01.2.07											
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	24	24	24	24	24	24	2.18.01.2.07.0006											
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	5	12	12	12	12	12	12	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	21	21	21	21	21	21	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	21	21	21	21	21	21	21
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	15	15	15	15	15	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	15	15	15	15	15	15
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1	1	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
2.18.02	Program Pengembangan Iklim penanaman Modal	Persentase Peningkatan jumlah investor	%	2.95	3	3.05	3.05	3.1	3.15	3.2	2.18.02	Program Pengembangan Iklim penanaman Modal	Persentase Peningkatan jumlah investor	%	2.95	3	3.05	3.05	3.1	3.15	3.2	









Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan Indikator lama	Target Lama							Kode Rekening (Pemutakhiran SIPD-RI)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran SIPD-RI)	Indikator (Pemutakhiran SIPD-RI)	Satuan Indikator Baru	Target Baru						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir
										2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN PEMALANG

SUJARWO, S.E., M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680508 199503 1 003